

ABSTRAK

Perjanjian *Convertible Bond Agreement* atau Obligasi Konversi adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang disebut juga sebagai pemegang obligasi (kreditur) dan penerbit obligasi (debitur), dimana salah satu klausul dalam perjanjian yang dibuat memuat isi bahwa dalam hal pihak debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan tidak membayar utang beserta bunga pada waktu yang ditentukan. Maka opsi yang ditawarkan adalah utang dan bunga yang menjadi kewajiban debitur yang harusnya dibayar kepada kreditur dengan opsi yang dibuat akan ditukar menjadi saham milik perusahaan debitur sebesar utang dan bunga. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain akibat hukum perjanjian *Convertible Bond Agreement* terhadap pihak pemegang obligasi dan penerbit obligasi? dan tindakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dari perjanjian *Convertible Bond Agreement*?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum yang khusus. Teknik mengumpulkan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan hukum perjanjian *Convertible Bond Agreement* berdasarkan ketentuan umum dapat memiliki kekuatan hukum selama para pihak sepakat akan opsi yang ditawarkan yaitu pengalihan utang menjadi saham, karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, para pihak bebas memuat kontrak dan mengatur sendiri isi dari kontrak tersebut, sepanjang memenuhi syarat sebagai suatu kontak atau perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan perjanjian tersebut dengan itikad baik, hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan atau wanprestasi. yang menjadi acuan terhadap aturan yang dipakai adalah aturan atau hukum yang lebih khusus mengenai saham, dimana setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas melakukan perjanjian, maka para perusahaan tersebut harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. dan segala ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut harus ditaati oleh setiap perusahaan.

ABSTRACT

Convertible Bond Agreement or Convertible Bond is an agreement made by parties who are also known as bondholders (creditors) and bond issuers (debtors), where one of the clauses in the agreement contains the contents that in the event the debtor defaults, namely by not pay debts and interest at the specified time. Then the options offered are debt and interest which is the debtor's obligation which should be paid to the creditor with the options made to be exchanged into shares of the debtor's company in the amount of debt and interest. In connection with the aforementioned matters, there are interesting issues to examine, among others, the legal consequences of the Convertible Bond Agreement on the bondholders and bond issuers? and legal action against the default of the Convertible Bond Agreement?

In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, and to find law in a concreto manner. The specification of this research is descriptive analyst, which does not only describe the problem, but also analyzes it based on the prevailing regulations in civil law and special law. The technique of collecting data is done through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the research conclude that the legal strength of the Convertible Bond Agreement based on general provisions can have legal force as long as the parties agree on the option offered, namely the transfer of debt to shares, because in accordance with the hopes of freedom of contract in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the parties are free to post Contract and self-regulating the contents of the contract, as long as it meets the requirements as a contact or agreement, is not prohibited by law in accordance with applicable customs, and the agreement is in good faith, according to what is mandated in Article 1320 of the Civil Code. But in its implementation, problems or defaults are found. the reference to the rules used is a more specific rule or law regarding shares, where every company that is a limited liability company enters into an agreement, then these companies must comply with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. and all provisions contained in the law must be obeyed by every company.